

ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Leo Budiriansyah

Leo.brsutp@gmail.com

Dosen Pengajar Universitas Tridinanti Palembang

ABSTRACT

This study aims to find out how is the level of employment and the influence of economic growth, investment (domestic investment and foreign investment), and provincial minimum wage affect it in the province of South Sumatra. The analytical tool used is Multiple Linear Regression with data obtained is secondary data that is economic growth, domestic investment, foreign investment, provincial minimum wage, and number of labor in South Sumatra Province during period 2006-2015. The results showed that the absorption of labor force in South Sumatra during the period 2006-2015 has a fluctuated value. More than 50 percent of the workforce is absorbed in the agricultural sector. The rest is mostly absorbed by the trade and services sectors. Based on the regression result, it is found that economic growth, domestic investment, foreign investment have a significant and positive effect on employment, while provincial minimum wage also has significant influence but has negative relation to employment in South Sumatra Province.

Keyword : Labor Force, domestic investment, foreign investment

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah tidak terlepas dari penanganan masalah ketenagakerjaan khususnya kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja serta pengangguran. Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerjadan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2013).

Secara teoritis terdapat keterkaitan antara pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Jika pertumbuhan

ekonomi meningkat maka berarti terjadi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah sehingga secara teori peningkatan ini menandakan adanya ekspansi dalam kegiatan produksi yang kemudian meningkatkan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian roda perekonomian akan terus bergulir sehingga mencapai tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri.

Dornbusch, *et al* (2001: 89) menyatakan bahwa output nasional (sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi) merupakan fungsi dari modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang dicapai. Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi, dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga akan membawa dampak positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja secara teoritis juga ditunjukkan melalui Hukum Okun. Menurut Mankiw (2007: 249-251) Hukum Okun adalah relasi negatif

antara pengangguran dan PDB (GDP). Hukum Okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hukum Okun (*Okun's law*) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan PDB, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar satu persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam PDB yang mendekati dua persen. Dengan kata lain, Hukum Okun menggambarkan apabila PDB meningkat sebesar dua persen maka akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kemudian menurunkan angka pengangguran sebesar satu persen.

Pertumbuhan ekonomibertautan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran yang disebut Produk Domestik Bruto(PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota.

Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami fluktuatif dalam tingkat pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan pada periode 2012-2015. Penurunan ini mengikuti tren penurunan pertumbuhan ekonomi skala nasional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan selama 2010-2015 adalah 5,6 persen pertahun.

Tabel 1 berikut ini menggambarkan perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013-2015.

Tabel 1

Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2015 (dalam juta Rupiah)

PDRB Sumsel	Periode		
	2013	2014	2015
PDRB atas dasar harga konstan 2010	232.175.048	243.093.768	254.022.862

% Pertumbuhan	5,31	4,70	4,50
---------------	------	------	------

Sumber: Diolah dari "Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2016" (BPS)

Berdasarkan data di atas, PDRB Sumsel atas dasar harga konstan 2010 nilainya terus meningkat selama 2013-2015. Akan tetapi, jika melihat angka pertumbuhannya, PDRB Sumsel terus menurun sejak tahun 2012-2015. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami kontraksi dalam 4 tahun terakhir.

Kondisi ekonomi global yang terpuruk berpengaruh terhadap melemahnya harga komoditas ekspor karena permintaan belum cukup kuat. Salah satu sumber perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumsel dari sisi permintaan adalah ekspor. Kegiatan ekspor mengalami kontraksi cukup dalam pada periode 2012-2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan nilai ekspor komoditas karet yang memiliki kontribusi terbesar dalam komposisi ekspor Sumatera Selatan (BPS Sumsel, 2016). Melemahnya permintaan pasar dunia terhadap komoditi karet Sumsel sangat berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan PDRB beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan terutama pada daerah-daerah penghasil karet utama.

Tabel 2 berikut ini menggambarkan perkembangan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2010-2015.

Tabel 2

Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Periode 2012-2015 (dalam milyar Rupiah)

Kabupaten/ Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010			
	2012	2013	2014	2015
Ogan Komeri ng Ulu	7.376,01	7.704,61	7.987,73	8.230,96
Ogan Komeri ng Ilir	14.230,59	15.135,83	15.902,78	16.668,45
Muara Enim	26.374,75	28.158,76	29.041,41	31.253,27

Lahat	9.479,39	9.937,39	10.317,90	10.537,52
Musi Rawas	9.245,29	9.788,57	10.510,08	11.049,70
Musi Banyuasin	35.290,94	36.683,31	38.397,35	39.272,81
Banyuasin	13.777,76	14.628,96	15.380,59	16.236,00
Ogan Komering Ulu Selatan	4.056,98	4.267,95	4.503,08	4.707,44
Ogan Komering Ulu Timur	6.951,88	7.435,45	7.821,52	8.354,95
Ogan Ilir	5.121,36	5.492,92	5.852,73	6.122,37
Empat Lawang	2.582,01	2.721,11	2.836,12	2.963,78
Pali	3.352,72	3.577,67	3.577,35	3.736,27
Musi Rawas Utara	4.104,39	4.190,45	4.606,18	4.759,31
Palembang	70.090,31	74.193,37	78.079,09	82.329,66
Prabumulih	3.496,88	3.674,19	4.097,01	4.295,41
Pagar Alam	1.641,56	1.735,06	1.814,40	1.892,92
Lubuk Linggau	2.943,70	3.042,98	3.235,62	3.439,78

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka (BPS), 2016

Dari tabel di atas, Kota Palembang merupakan daerah penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Sumatera Selatan dengan rata-rata PDRB selama tahun 2012-2015 adalah sebesar 76.173 milyar rupiah per tahun atau sekitar 32 persen dari total rata-rata PDRB Sumsel per tahun. Daerah penyumbang terbesar bagi PDRB Sumsel lainnya adalah Musi Banyuasin. Selama tahun 2012-2015, Kabupaten Musi Banyuasin menyumbang PDRB sebesar 37.411 milyar rupiah per tahun atau sekitar 16 persen dari total rata-rata PDRB Sumsel per tahun. Sementara Kota Pagar Alam menjadi daerah penyumbang PDRB terkecil yaitu hanya sebesar 1.771 milyar rupiah per tahun atau sekitar 0,7 persen dari PDRB Sumsel per tahun selama periode 2012-2015.

Seiring menurunnya angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, penurunan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Tabel berikut menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi

yang dicapai kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2012-2015.

Tabel 3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Periode 2012-2015

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan ekonomi				Rata - Rata
	2012	2013	2014	2015	
Ogan Komering Ulu	5,26	4,46	3,67	3,05	4,11
Ogan Komering Ilir	6,56	6,36	5,07	4,81	5,70
Muara Enim	8,27	6,76	3,13	7,62	6,45
Lahat	5,28	4,83	3,83	2,13	4,02
Musi Rawas	0,85	5,88	7,37	5,13	4,81
Musi Banyuasin	7,25	3,95	4,67	2,28	4,54
Banyuasin	6,15	6,18	5,14	5,56	5,76
Ogan Komering Ulu Selatan	5,26	5,20	5,51	4,54	5,13
Ogan Komering Ulu Timur	7,20	6,96	5,19	6,82	6,54
Ogan Ilir	8,03	7,26	6,55	4,61	6,61
Empat Lawang	6,11	5,39	4,23	4,50	5,06
Pali	7,30	6,71	-0,01	4,44	4,61
Musi Rawas Utara	2,58	2,10	9,92	3,32	4,48
Palembang	7,75	5,85	5,24	5,44	6,07
Prabumulih	8,32	5,07	11,51	4,84	7,44
Pagar Alam	6,27	5,70	4,57	4,33	5,22
Lubuk Linggau	6,35	3,37	6,33	6,31	5,59

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka (BPS), 2016

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, secara teori pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Tabel berikut ini menggambarkan keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan periode 2011-2015.

Tabel 4

Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2012-2015

Keadaan Tenaga Kerja	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Penduduk yang Bekerja	3.532.932	3.464.620	3.692.806	3.695.866
Penganggur	213.441	182.376	192.868	238.921
Jumlah Angkatan Kerja	3.746.373	3.646.996	3.885.674	3.934.787
Tingkat Pengangguran (%)	5,70	5,00	4,96	6,07

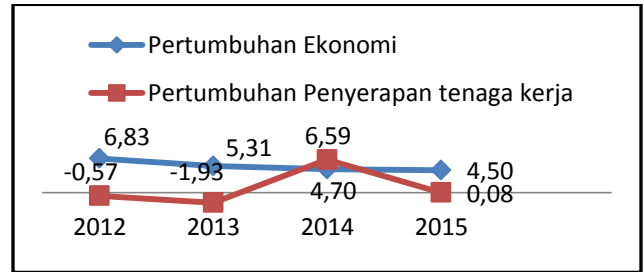
Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka (BPS), 2016

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk yang bekerja selama tahun 2011 hingga 2013 mengalami penurunan sebesar 88.484 orang tenaga kerja. Penurunan jumlah penduduk yang bekerja ini dibarengi dengan penurunan jumlah angkatan kerja sejak tahun 2011 hingga 2013 yaitu sebesar 123.677 orang. Tingkat penurunan angkatan kerja yang lebih besar dibanding penurunan jumlah tenaga kerja (penduduk yang bekerja) menyebabkan persentase tingkat pengangguran juga terus turun selama tahun 2011-2013 yaitu dari 5,77 persen menjadi 5 persen. Jumlah penduduk yang bekerja kembali mengalami kenaikan sejak tahun 2014 hingga 2015 yaitu meningkat sebesar 231.246 orang tenaga kerja sejak tahun 2013. Peningkatan jumlah tenaga kerja ini juga diiringi dengan peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 287.791 orang. Porsi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja jauh lebih kecil dibanding peningkatan angkatan kerja sehingga mengakibatkan angka pengangguran kembali naik sejak tahun 2013-2015 yaitu menjadi 6,07 persen.

Berikut ini Gambar 1 menunjukkan grafik pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan.

Gambar 1

Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Sumatera Selatan Tahun 2012-2015



Sumber: Diolah dari data BPS, 2016

Dari gambar di atas terlihat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Provinsi Sumatera Selatan tidak berjalan dalam tren yang sama. Selama tahun 2012-2015 pertumbuhan ekonomi cenderung turun sementara penyerapan tenaga kerja pertumbuhannya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 hingga 2013 pertumbuhan tenaga kerja mengalami penurunan bahkan hingga mencapai nilai persentase yang negatif. Hal ini artinya jumlah penduduk yang bekerja terus berkurang selama periode tersebut. Pada tahun 2014, pertumbuhan jumlah tenaga kerja melonjak drastis dari -1,93 persen menjadi 6,59 persen pertahun. Kemudian pada tahun 2015 persentase pertumbuhan tenaga kerja kembali menurun tajam menjadi 0,08 persen pertahun.

Problematika ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan tidak jauh berbeda dengan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia pada umumnya. Baik itu menyangkut tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi, maupun tingkat produktivitas tenaga kerja yang masih belum optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang harus diantisipasi dari sejak dini sebelum terjadi peningkatan karena perubahan struktur umur penduduk. Tantangan itu mencakup dua aspek sekaligus, yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja, dan peningkatan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah berkerja

sehingga dapat memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak/*decent living* (BPS, 2016: 2).

Berikut ini tabel 5 yang menggambarkan jumlah penduduk yang bekerja menurut kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2015.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Yang Bekerja
Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Tahun 2013-2015

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Yang Bekerja (orang)			Rata- Rata Per Tahun
	2013	2014	2015	
Ogan Komering Ulu	133.549	149.945	155.208	146.548
Ogan Komering Ilir	361.153	373.278	343.665	359.118
Muara Enim	341.978	350.439	282.665	333.637
Lahat	184.178	184.770	197.591	187.377
Musi Rawas	296.100	310.699	193.051	273.007
Musi Banyuasin	239.585	268.495	269.140	261.889
Banyuasin	323.299	367.665	360.305	349.733
Oku Selatan	169.324	184.990	186.238	176.531
Oku Timur	288.110	294.632	321.099	306.042
Ogan Ilir	202.054	205.412	202.337	199.748
Empat Lawang	105.127	108.160	115.421	110.551
PALI	*	*	87.253	87.253
Musi Rawas Utara	*	*	79.422	79.422
Palembang	600.408	661.192	663.315	624.781
Prabumulih	73.231	78.001	82.887	74.932
Pagar Alam	58.433	62.482	72.798	63.169
Lubuk Linggau	88.091	93.246	83.471	87.586

Sumber: Diolah dari "Sumatera Selatan Dalam Angka 2012-2016" (BPS)

*Data tidak tersedia

Jumlah penduduk yang bekerja di berbagai daerah di Sumatera Selatan cenderung mengalami fluktuasi selama tahun 2011-2015. Kota Palembang sebagai daerah pusat pertumbuhan di Sumatera Selatan merupakan daerah yg memiliki rata-rata jumlah penduduk bekerja per tahun paling besar yaitu 624.781 orang tenaga kerja. Sementara Kota Pagar Alam adalah daerah yang memiliki rata-rata jumlah penduduk berkerja per tahun paling kecil yaitu hanya 63.169 orang tenaga kerja.

Masalah penyerapan tenaga kerja dan pengangguran merupakan masalah serius yang harus di perhatikan oleh pemerintah. Faktor utama besarnya angka pengangguran adalah keterbatasan lapangan kerja. Masalah ini sudah pasti akan memberikan tekanan berat pada perekonomian serta dampak buruk bagi sosial seperti kriminalitas dan lain sebagainya. Salah satu langkah strategis pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru agar mengurangi pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan adalah pemerintah harus menggalang dana investasi baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat maupun investasi luar negeri dengan cara memperbaiki iklim bisnis dan memangkas birokrasi perizinan. Peningkatan investasi diharapkan akan menggairahkan pertumbuhan sektor produksi yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tentu saja juga berimbas pada peningkatan penyerapan tenaga kerja akibat terciptanya lapangan kerja baru.

Tabel berikut ini menggambarkan Nilai Realisasi Investasi dari jenis Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2013.

Tabel 6
Nilai Realisasi Investasi Di Sumatera Selatan
Tahun 2010-2013

Investasi	Nilai Realisasi			
	2010	2011	2012	2013
PMDN (juta Rp)	663.096	4.779.372	9.921.818	12.179.098
PMA (ribu US \$)	44.811	994.344	2.370.152	6.230.734

Sumber: Diolah dari data BPS, 2016

Realisasi PMDN Sumatera Selatan selama tahun 2010-2013 rata-rata mencapai 11.376.736 juta rupiah per tahun. Berdasarkan data BPS, Nilai realisasi PMDN tersebut didominasi sekitar 40 persen oleh investasi di sektor pertanian, 30 persen di sektor industri pengolahan, sisanya adalah investasi di sektor listrik-gas-air bersih, pertambangan, serta perdagangan-hotel-restoran.

Sementara untuk PMA, rata-rata investasi yang masuk ke Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2009-2013 1.967.154 ribu US\$. Data BPS menunjukkan nilai realisasi PMA di Sumatera Selatan juga didominasi oleh investasi pada sektor pertanian yaitu sekitar 35 persen, sektor industri pengolahan sekitar 32 persen, dan sisanya oleh sektor pertambangan, perdagangan-hotel-restoran, listrik-gas-air minum dan bangunan.

Tabel berikut ini mengungkapkan persentase jumlah penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha di Sumatera Selatan 2013-2015.

Tabel 7

Persentase Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015

Lapangan Usaha	2013	2014	2015
Sektor Primer			
- Pertanian	54,86	53,37	54,74
- Pertambangan	1,49	1,02	1,56
Sektor Sekunder			
- Industri	4,48	5,05	4,7
- Listrik, Air, dan Gas	0,19	0,17	0,17
- Bangunan	3,82	4,32	4,54
Sektor Tersier			
- Perdagangan	15,46	11,96	16,82
- Angkutan/Komunikasi	3,63	5,65	3,64
- Keuangan	2,24	1,72	1,61
- Jasa-Jasa	13,44	9,76	12,22

Sumber: Situasi Ketenagakerjaan Sumsel, 2017

Tabel 7 di atas mengungkapkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan selama tahun 2012-2015 paling banyak terjadi pada lapangan usaha pertanian. Hal ini sejalan dengan persentase investasi (PMDN dan PMA) berdasarkan lapangan usaha yang telah dibahas sebelumnya. Rata-rata persentase penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian selama tahun 2012-2015 adalah 54,8 persen dari total jumlah tenaga kerja. Hal ini berarti lebih dari separuh jumlah keseluruhan tenaga kerja yang ada di Sumatera Selatan bekerja di sektor pertanian. Kontribusi penyerapan tenaga kerja terbesar selanjutnya adalah pada sektor usaha perdagangan dan jasa-jasa (termasuk di dalamnya usaha hotel dan restoran). Sektor perdagangan menyerap tenaga kerja rata-rata 14,71 persen sedangkan sektor jasa-jasa sebesar 12,01 persen. Sektor usaha yang paling kecil menyerap tenaga kerja adalah sektor listrik, air dan gas dengan rata-rata persentase sebesar 0,18 persen dari total tenaga kerja di Sumatera Selatan.

Sektor pertanian memang masih menjadi sektor utama dalam perekonomian Sumatera Selatan. Menurut BPS (2016: 67), lapangan usaha pertanian mencakup sublapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, sublapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu, serta sublapangan usaha perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2015, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas harga berlaku sebesar 16,58 persen. Sublapangan usaha tanaman perkebunan merupakan penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha pertanian yaitu tercatat sebesar 34,6 persen dari seluruh nilai tambah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Investasi terbesar juga ada pada sublapangan usaha tanaman perkebunan. Sekitar 99 persen atau hampir keseluruhan dari investasi sektor pertanian baik PMDN maupun PMA direalisasikan untuk sublapangan usaha tanaman perkebunan.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, menurut data BPS, realisasi investasi terbesar kedua

setelah pada sektor pertanian adalah pada sektor industri. Sementara kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Selatan pada tahun 2015 adalah sebesar 18,27 persen. Angka tersebut merupakan terbesar kedua setelah kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Sumatera Selatan. Akan tetapi persentase penyerapan tenaga kerja pada sektor ini tergolong kecil yaitu hanya sekitar 4,95 persen dari total jumlah tenaga kerja di Sumatera Selatan. Besarnya persentase penyerapan tenaga kerja ini tidak sebanding dengan besarnya nilai realisasi investasi pada sektor industri serta besar kontribusinya terhadap PDRB Sumatera Selatan. Sangat besar kemungkinan investasi pada sektor ini lebih bersifat padat modal bukan padat karya sehingga lapangan usaha yang terbentuk pada sektor ini lebih kepada pengembangan teknologi dan penggunaan peralatan mesin serta tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan teori permintaan dan penawaran tenaga kerja, salah satu faktor yang menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah yang berlaku. Tingkat upah di Indonesia diatur dalam kebijakan upah minimum. Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 2001: 21).

Kebijakan upah minimum di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan para pekerja. Penetapan upah minimum sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, berlaku untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Upah minimum terdiri dari 4 jenis yaitu: (a) Upah minimum provinsi (UMP) yaitu upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi; (b) Upah minimum kabupaten/kota (UMK) yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah

kabupaten/kota; (c) Upah minimum sektoral provinsi (UMSP) yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi; (d) Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan tahun 2011-2015.

Tabel 8

Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015 (Rupiah)

Tahun	Upah Minimum Provinsi
2011	1.048.440
2012	1.195.220
2013	1.630.000
2014	1.825.600
2015	1.974.346

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka (BPS), 2016

Catatan: 5 hari kerja (1 bulan = 21 hari kerja)
peraturan 03/97 Bab IV

6 hari kerja (1 bulan = 25 hari kerja)
pasal 9 ayat 4

Menurut Sumarsono (2009), ada tiga komponen : (a) Kebutuhan Fisik Minimum (KFM); (b) Indeks Harga Konsumen; dan (c) Pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 13 tahun 2012, faktor faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum adalah : (a) Nilai Kebutuhan Kehidupan Layak (KHL); (b) Produktifitas makro (perbandingan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja di periode yang sama); (c) Pertumbuhan Ekonomi (Nilai PDRB); (d) Kondisi pasar tenaga kerja (perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama); (e) Kondisi usaha yang tidak mampu (marginal), ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu

pada periode yang sama. 23 Penetapan upah minimum dihitung didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), Kemudian terjadi perubahan penghitungan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

Upah Minimum Provinsi cenderung terus naik setiap tahunnya diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam komponen yang menjadi faktor penetapan Upah Minimum. Secara teori, hal ini tentu berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja sehingga akan berdampak pada jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menganalisis bagaimana kondisi tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tingkat upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan?

II TELAAH TEORITIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Tenaga Kerja

Menurut Ehrenberg dan Smith (2012: 27), tenaga kerja adalah orang yang umurnya di atas 16 tahun dan sedang dipekerjakan oleh perusahaan.

Sitanggang dan Nachrowi (2004: 25) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah sebagian dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah sebagian penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa bila terdapat permintaan terhadap barang dan jasa.

Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Subri, 2012: 59).

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu

antara 15-64 tahun. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja (Tarmizi, 2012: 18).

Ketenagakerjaan menurut pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum masa kerja misalnya adalah kesempatan kerja, perencanaan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja, sedangkan hal sesudah masa kerja, misalnya adalah masalah pensiun.

2.1.2. Konsep Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Konsep angkatan kerja yang paling luas ialah angkatan kerja menyeluruh atau total labor force, yang dirumuskan sebagai keseluruhan angkatan kerja dari semua individu yang tidak di lembagakan berusia 16 tahun atau lebih tua dalam satu minggu, termasuk angkatan militer, baik tenaganya yang digunakan maupun tidak digunakan (Afrida, 2003: 99).

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (BPS, 2016: xli). Penduduk usia kurang 15 tahun meski telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk angkatan kerja. Sementara definisi bukan angkatan kerja menurut BPS adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah kelompok penduduk tertentu dimana dapat dihitung dari perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat dinyatakan untuk seluruh penduduk dalam usia kerja dan dapat pula dinyatakan untuk suatu kelompok tertentu seperti kelompok laki-laki, kelompok wanita di kota, kelompok tenaga terdidik, kelompok umur 10-14 tahun di desa dan lain-lain (Simanjuntak, 1985: 36).

Menurut BPS (2015:5), Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja atau tenaga kerja. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan tentang kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif (angkatan kerja) untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan besaran-besaran yang mempengaruhi TPAK.

2.1.3. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang di butuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan tenaga kerja akan di pengaruhi oleh tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi (Afrida, 2003: 205). Seperti layaknya teori dasar permintaan dalam ekonomi, permintaan tenaga kerja juga dijelaskan dengan menggunakan kurva permintaan tenaga kerja.

Menurut Tarmizi (2012: 18), bila upah meningkat maka permintaan akan mengalami penurunan, sebaliknya, permintaan tenaga kerja akan meningkat bila upah turun. Dengan demikian hubungan antara permintaan tenaga kerja dengan tingkat upah merupakan hubungan yang terbalik dan karena itu, slope kurva permintaan tenaga kerja bersifat '*downward*'. Selanjutnya pada gambar di atas, dalam jangka pendek, kurva permintaan tenaga kerja adalah D_{SR} dengan upah W_1 dan tenaga kerja L_1 (titik a). Kemudian upah turun dari W_1 ke W_2 , terjadi efek output, tenaga kerja bertambah menjadi L_2 (titik b). Dalam jangka panjang (D_{LR}), modal tidak konstan (variabel) dan karena itu terjadi juga efek substitusi yang selanjutnya akan meningkatkan jumlah tenaga kerja menjadi L_3 (titik c)

Menurut Sumarsono (2009: 25), permintaan tenaga kerja dipengaruhi :

1. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal hal berikut :
 - a) Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau scale effect.
 - b) Apabila upah naik (asumsi harga dari barang modal lainya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau substitution effect.
2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja :
 - a) Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, maka produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.
 - b) Apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya produksi akan turun dan tentunya mengakibatkan pula harga jual per unit barang akan turun. Pada keadaan ini produsen cenderung untuk meningkatkan produksi barangnya karena permintaan bertambah banyak. Disamping itu permintaan tenaga kerja dapat bertambah besar karena peningkatan kegiatan perusahaan. Keadaan ini menyebabkan bergesernya kurva

permintaan tenaga kerja ke arah kanan. Pergeseran ini karena pengaruh skala produksi atau *scale effect*. Efek selanjutnya akan terjadi bila harga barang-barang modal turun adalah efek substitusi. Keadaan ini dapat terjadi karena produsen cenderung untuk menambah jumlah barang modal (mesin) sehingga terjadi kapital intensif dalam proses produksi. Jadi secara relatif penggunaan tenaga kerjanya akan berkurang.

Belaante dan Jackson (2000:131) menyatakan permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah pada keseimbangan.

2.1.4. Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja

Kesempatan kerja mengandung pengertian bahwa besarnya kesediaan usaha produksi untuk mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, yang dapat berarti lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja yang ada dari suatu saat dari kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja dapat tercipta apabila terjadi permintaan tenaga kerja di pasar kerja, sehingga dengan kata lain kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengembangkan indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Tingkat Kesempatan Kerja adalah indikator yang menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Dengan kata lain indikator ini menghitung peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat Kesempatan Kerja dihitung dengan mencari persentase dari perbandingan antara jumlah penduduk bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rumus Tingkat Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut: (<https://sirusa.bps.go.id>)

$$TKK = \frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

Keterbatasan kesempatan kerja sering kali terjadi karena ketidakmampuan sektor-sektor menampung limpahan tenaga kerja yang disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk. Karena laju pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan sektor perekonomian walaupun ada hanya berhasil dalam waktu jangka pendek.

Secara teoritis, ada tiga cara pokok untuk menciptakan kesempatan kerja atau berusaha dalam jangka panjang. Cara pertama adalah dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi penawaran tenaga kerja. Tetapi seperti dikemukakan di atas, cara ini tidak memadai lagi bagi Indonesia karena angka kelahiran memang telah relatif rendah dan dampaknya terhadap pertumbuhan tenaga kerja kurang signifikan dalam jangka pendek. Cara kedua adalah dengan meningkatkan intensitas pekerja dalam menghasilkan output (*labour intensity of output*). Tetapi dalam jangka panjang, cara ini tidak selalu berhasil karena tidak selalu kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Cara ketiga adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Cara ini bukan tanpa kualifikasi karena secara empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja tidak terdapat hubungan otomatis atau niscaya, tetapi justru tantangannya menjadi riil, karena hubungan yang tidak otomatis itu, maka peranan pemerintah menjadi strategis dan crucial untuk merancang strategi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga "ramah" terhadap ketenagakerjaan (Mahalli, 2008: 128).

Pertumbuhan kesempatan kerja tentu akan diiringi dengan naiknya tingkat penyerapan tenaga kerja. Menurut Simanjuntak (2001), penyerapan tenaga kerja adalah penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor. Menurut Kuncoro (2005), penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja.

Konsep penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dalam berbagai sektor ekonomi. Sementara untuk melihat bagaimana kondisi penambahan penyerapan tenaga kerja yang terjadi akibat perubahan

pertumbuhan ekonomi digunakan elastisitas penyerapan tenaga kerja.

2.1.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi para ahli ekonom menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan setiap orang dalam perekonomian. Berapa besar perubahan pertumbuhan perekonomian suatu negara diukur dalam kurun waktu pertahun. Apakah pertumbuhannya meningkat atau malah semakin menurun yang disebabkan oleh berbagai faktor-faktor seperti perubahan tenaga kerja, modal, investasi dan sumber daya alam yang tersedia di suatu negara.

Sebagai tolak ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah hasil produk barang dan jasa orang-orang dan perusahaan. Dinamakan bruto karena memasuki komponen penyusutan. Dinamakan domestik karena batasannya adalah suatu wilayah atau negara, sehingga didalamnya termasuk hasil-hasil barang dan jasa perusahaan serta yang dihitung adalah produksi barang dan jasa.

Produk Domestik Bruto (GDP) mengukur pendapatan dan pengeluaran total pada perekonomian. Karena GDP adalah ukuran yang paling luas untuk keseluruhan kondisi perekonomian (Mankiw, 2007:247).

Menurut Meier dan Rouch (2000) dalam Arsyad (2010:3), selama dekade 1950-an hingga awal dekade 1960-an, kebijakan-kebijakan pembangunan ditunjukkan terutama sekali pada maksimisasi pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) melalui proses modal dan akumulasi industrilalisasi.

Jumlah nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut selama satu tahun fiskal di sebut dengan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) yang dalam bahasa Indonesiannya disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) (Arsyad, 2010:20)

Dinegara berkembang, yang sering juga digunakan sebagai “Dunia Ketiga” konsep Produk Domestik Bruto adalah konsep yang paling penting

kalau dibandingkan pendapatan nasional lainnya. Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam tahun tertentu. Produk Domestik Bruto atau dalam istilah Inggrisnya *Gross Domestic Product* (GDP), adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara negara tersebut dan negara asing (Sukirno, 2010:34-35). Pendapatan perkapita atau PDRB merupakan jadi tujuan pembangunan ekonomi (*economic development*) adalah suatu proses kenaikan pendapatan perkapita riil secara terus menerus dalam jangka panjang yang diiringi dengan perubahan kearah yang lebih baik dalam berbagai hal, baik struktur ekonomi ekonomi (menjadi lebih moderen), distribusi kekayaan, sikap, cara pandang terhadap sesuatu, peraturan, kesejahteraan, politik dan lain-lain. Atau dengan kata lain perubahan yang sejalan dan melengkapi juga yang terjadi harus terjadi dalam modal manusia, teknologi, sosial dan kelembagaan agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekomomi jangka panjang.

Menurut Tarigan(2007:21) PDRB atau pendapatan regional di bedakan atas dua bentuk yaitu hargaberlaku dan hargakonstan :

- a. Pendapatan regional yang didalamnyamasihada unsurinflansinya dinamakan pendapatan regional atas dasarharga berlaku.
- b. Pendapatan regional denganfaktorinflasiyang udahditiadakanmerupakan pendapatan regionalatashargakonstan,artinyah argaprodukdidasarkan atas hargapadatahun tertentuyangdisebut tahundasar.

2.1.6. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Di sini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan penambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial

seperti kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan, dengan rasa aman dan tenteram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 2010: 27).

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) bertautan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran yang disebut produk domestik bruto (PDB) pada aras nasional dan produk domestik regional bruto (PDRB) untuk daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota. BPS (2016:12) menyebut pertumbuhan ekonomi sebagai pertumbuhan produksi riil, baik secara sektor maupun totalitasnya. Disebut pertumbuhan produksi riil karena harga yang digunakan dalam menilai suatu produksi dari tahun ke tahun menggunakan harga pada tahun tertentu sehingga perubahan harga (inflasi) tidak mempengaruhi nilai produksinya. Penilaian ini dapat dilakukan atas dasar harga berlaku (*current price*) pada tahun perhitungan, atau atas dasar harga konstan (*constant price*) dari suatu tahun yang dipilih sebagai tahun dasar (*base year*).

2.1.7. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa adanya kaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka berarti terjadi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah sehingga secara teori peningkatan ini menandakan adanya ekspansi dalam kegiatan produksi yang kemudian meningkatkan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

Dornbusch, et al (2001: 89) menyatakan bahwa output nasional (sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi) merupakan fungsi dari modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang dicapai. Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi, dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga akan membawa dampak positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja secara teoritis juga ditunjukkan melalui Hukum Okun. Menurut Mankiw (2007:249-251), Hukum Okun adalah relasi negatif antara pengangguran dan PDB (GDP). Hukum Okun

merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hukum Okun (*Okun's law*) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan PDB, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar satu persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam PDB yang mendekati dua persen. Dengan kata lain, Hukum Okun menggambarkan apabila PDB meningkat sebesar dua persen maka akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kemudian menurunkan angka pengangguran sebesar satu persen.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak mendorong penyerapan tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya masalah pengangguran dan kemiskinan yang bisa berujung pada timbulnya ketidakstabilan sosial. Sementara penyerapan tenaga kerja yang tidak mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi akan menciptakan gangguan dalam tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah tidak terbatas. Dalam keadaan demikian, peranan pertumbuhan ekonomi mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber dari ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi.

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja yang optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisiensi memerlukan kebijakan yang memperhitungkan kondisi internal maupun perkembangan eksternal. Kondisi tersebut merupakan input bagi pengambilan keputusan (Asaddin dan Mansoer, 2001).

2.1.8. Upah

Upah yang diberikan tergantung (Sulistiawati, 2012) : (a) Biaya keperluan hidup minimum pekerja

dan keluarganya; (b) Peraturan Undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja; (c) Produktivitas marginal tenaga kerja; (d) Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha; (e) Perbedaan jenis pekerjaan.

Pengertian upah menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Bab I Pasal 30 Ayat 1 adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang akan dilakukan.

Upah yang diterima oleh pekerja dapat dibedakan menjadi dua (BPS, 2016) yaitu: (a) Upah Nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan; (b) Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh. Upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Pengupahan di Indonesia pada umumnya di dasarkan kepada tiga fungsi upah (Sumarsono, 2003) : 56) yaitu: (a) Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya; (b) Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang; (c) Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja.

2.1.9. Upah Minimum

Penetapan upah minimum sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, berlaku untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Upah minimum terdiri dari 4 jenis: (a) Upah minimum provinsi (UMP) yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi; (b) Upah minimum kabupaten/kota (UMK) yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota; (c) Upah minimum sektoral provinsi (UMSP) yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi; (d) Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.

Penetapan upah minimum dihitung berdasarkan berbagai komponen. Menurut Sumarsono (2009), ada tiga komponen: (a) Kebutuhan Fisik Minimum (KFM); (b) Indeks Harga Konsumen; dan (c) Pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 13 tahun 2012 faktor faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum adalah : (a) Nilai Kebutuhan Kehidupan Layak (KHL); (b) Produktivitas makro (perbandingan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja di periode yang sama); (c) Pertumbuhan Ekonomi (Nilai PDRB); (d) Kondisi pasar tenaga kerja (perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama); (e) Kondisi usaha yang tidak mampu (marginal), ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode yang sama.

Penetapan upah minimum awalnya dihitung berdasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) namun kemudian terjadi perubahan penghitungan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Perubahan itu disebabkan tidak sesuainya lagi penetapan upah berdasarkan kebutuhan fisik minimum, sehingga timbul perubahan yang disebut dengan KHM, tetapi penetapan upah minimum berdasarkan KHM mendapat koreksi cukup besar dari pekerja yang beranggapan, terjadi implikasi pada rendahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja tingkat level bawah. Beberapa pendekatan dan penjelasan langsung terhadap pekerja, penetapan upah minimum berdasarkan KHM dapat berjalan dan diterima pihak pekerja dan pengusaha.

Menurut Tarmizi (2012: 112), sebelum regulasi, pasar berada dalam keseimbangan dengan tingkat upah dan jumlah pekerja tertentu. Jika upah minimum diberlakukan di atas upah pasar, maka penetapan upah minimum tersebut akan menghasilkan suatu situasi dimana penawaran tenaga kerja akan lebih besar dari permintaan tenaga kerja ($Q_s > Q_d$). Berarti terjadi eksese supply dan hal ini akan meningkatkan pengangguran. Jika upah minimum di bawah upah pasar, berarti terjadi eksese demand yaitu permintaan lebih besar dari penawaran tenaga kerja ($Q_d > Q_s$). Dengan mekanisme pasar, upah minimum akan bergerak naik sehingga mencapai upah pasar.

2.1.10. Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2010: 107). Mesin digerakkan oleh tenaga kerja atau sumber-sumber serta bahan-bahan dikelola oleh manusia. Menurut Samuelson (2005: 198), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi dimasa mendatang.

Sedangkan menurut Dumairy (2000: 81), investasi adalah penambahan barang modal secara netto positif. Seseorang yang membeli barang modal tetapi ditujukan untuk mengganti barang modal yang aus dalam proses produksi bukanlah merupakan investasi, tetapi disebut dengan pembelian barang modal untuk mengganti (replacement). Pembelian barang modal ini merupakan investasi yang akan datang. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran atau pembelanjaan yang dapat berupa beberapa jenis barang modal, bangunan, peralatan modal dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2007: 62).

Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Chusna (2013) mengkaji tentang pengaruh laju pertumbuhan sektor industri, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di provinsi Jawa Tengah tahun 1980-2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum dan pengaruh pertumbuhan sektor industri, investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Jawa Tengah. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri menunjukkan tren yang semakin menurun sedangkan investasi, upah dan penyerapan tenaga kerja sektor industri menunjukkan tren yang semakin meningkat, laju pertumbuhan sektor industri tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, sedangkan investasi dan upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Jawa Tengah.

Pangastuti (2015) melakukan penelitian tentang analisis faktor faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh PDRB, Upah minimum Kabupaten/ Kota (UMK), Pengangguran, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penyerapan tenaga di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan *Metode Random Effect (REM)*. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara UMK, pengangguran dan PAD memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu dikajinya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah antara lain jumlah perusahaan, nilai produksi, suku bunga dan lain sebagainya.

Dimas dan Woyanti (2009), melakukan penelitian tentang penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan GDP (PDRB), upah dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Jakarta tahun 1990-2004. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jakarta, sedangkan variabel upah dan investasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengaruh negatif ini diakibatkan oleh investasi yang masuk lebih menitikberatkan kepada bisnis padat modal dibanding padat karya sehingga investasi tidak meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Sobita dan Suparta (2014) melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen PDRB riil, Upah riil, harga Modal bidang pertanian, dan Indeks Harga Implisit terhadap variabel dependen Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data PDRB riil, Upah riil, harga Modal di bidang pertanian, dan Indeks Harga Implisit dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2008-2012. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif (statistik) dengan menggunakan analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen PDRB riil dan harga Modal di bidang pertanian secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan PDRB riil dan Modal di bidang pertanian akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu Variabel Upah riil secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan Upah riil akan menurunkan penyerapan tenaga kerja.

Sulistiawati (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di provinsi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder periode 2006-2010. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis path. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan

produktivitas rendah yang umumnya terserap di sektor primer, sektor yang menyerap sebagian besar tenaga kerja. Kedua, penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan sosial memiliki koefisien path sebesar 0,08 dengan nilai probabilitas signifikansi (Sig) sebesar 0,332. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak menyebabkan peningkatan kesejahteraan sosial pada provinsi di Indonesia karena: (1). Upah minimum yang diterima oleh tenaga kerja lebih rendah dari kebutuhan dasar minimum, (2) upah minimum yang diterima tenaga kerja lebih rendah dari tingkat pendapatan pajak.

Arida *et al* (2015) melakukan penelitian tentang analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja pada sektor pertanian di Provinsi Aceh. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan persamaan tunggal berganda yaitu metode Ordinary Least Square (OLS) atau metode kuadrat terkecil. Metode ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja pada sektor pertanian di Provinsi Aceh. Pada persamaan permintaan tenaga kerja, faktor-faktor yang dianalisis adalah luas lahan pertanian, upah tenaga kerja sektor pertanian dan investasi sektor pertanian. Pada persamaan penawaran tenaga kerja, faktor-faktor yang dianalisis adalah jumlah penduduk di pedesaan, upah tenaga kerja sektor pertanian dan pengangguran di pedesaan Provinsi Aceh. Hasil analisis permintaan tenaga kerja menunjukkan bahwa variabel investasi sektor pertanian dan lahan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap permintaan tenaga kerja, dan variabel pekerja sektor pertanian memberikan dampak negatif namun tidak signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Hasil analisis penawaran tenaga kerja menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja di sektor pertanian dan pengangguran di pedesaan berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap pasokan tenaga kerja, sedangkan kualitas variabel penduduk memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pasokan tenaga kerja.

III METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada masalah ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan dengan mengkaji seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum sektoral terhadap perubahan penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan pada periode tahun 2006-2015.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Data yang dikumpulkan merupakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan, data investasi PMA dan PMDN di Sumatera Selatan, data perkembangan upah minimum provinsi Sumatera Selatan, serta data jumlah penduduk yang bekerja di sektor-sektor ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Data yang diteliti adalah data periode tahun 2006-2015.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan melalui pendekatan kepustakaan (*Library Research*) yakni dilakukan dengan mendapatkan data sekunder yang berasal dari data instansi yang terkait.

3.4. Definisi Operasional Data

Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran yang disebut *produk domestik bruto* (PDB) pada aras nasional dan *produk domestik regional bruto* (PDRB) untuk daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda,

baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha.

4. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berkongsi dengan penanam modal dalam negeri.
5. Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi
6. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa.
7. Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
8. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan (keuntungan) dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pada pekerjaan keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).
9. Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dalam berbagai sektor ekonomi. Jumlah penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini diwakilkan oleh jumlah penduduk yang bekerja dalam satu periode.

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Regresi Berganda

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) atau metode kuadrat terkecil melalui *software* SPSS 23.

Untuk analisis penyerapan tenaga kerja Sumatera Selatan, model yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$PTk = \beta_0 + \beta_1 PE + \beta_2 PMDN + \beta_3 PMA + \beta_4 UMP + e$$

Keterangan:

- PTkP* = *Penyerapan Tenaga Kerja*
- PE* = *Pertumbuhan Ekonomi*
- PMDNP* = *Penanaman Modal Dalam Negeri*
- PMAP* = *Penanaman Modal Asing*
- UMP* = *Upah Minimum Provinsi*
- β_0 = *Konstanta*
- $\beta_1 - \beta_4$ = *Koefisien regresi*
- e* = *error term (variabel pengganggu)*

Untuk memenuhi persyaratan asumsi klasik, maka sebelum dilakukan regresi terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik yaitu berupa uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Setelah uji asumsi klasik dilakukan maka akan dilakukan uji statistik parsial dan simultan.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Provinsi Sumatera Selatan

Analisis penyerapan tenaga kerja Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan melakukan estimasi terhadap pengaruh dari variabel pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan upah minimum provinsi terhadap variabel terikat penyerapan tenaga kerja. Namun sebelumnya terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut baik atau tidak jika digunakan untuk melakukan penaksiran. Suatu model dikatakan baik apabila bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yaitu memenuhi asumsi klasik atau terhindar dari masalah-masalah multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Untuk mendapatkan hasil memenuhi sifat tersebut dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Setelah melakukan uji asumsi klasik akan dilakukan uji statistik parsial dan simultan.

4.2.1. Uji Asumsi Klasik

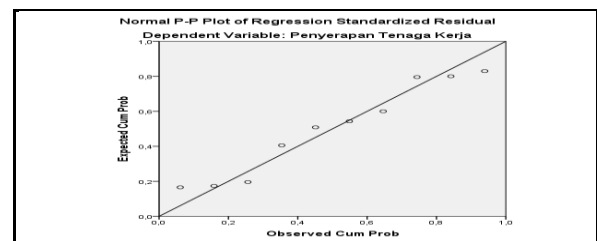
4.2.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan dependen mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian ini menggunakan pendekatan grafik *Normal P-P of Resregion Standardized Residual* yang didapat dari output perhitungan regresi. Dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka memenuhi asumsi normalitas.

Berikut ini gambar 4.1 yang menggambarkan *Normal P-P of Resregion Standardized Residual*.

Gambar 2

Grafik Normal P-P of Resregion Standardized Residual.



Sumber: Data olahan, 2016

Berdasarkan gambar di atas terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi dengan normal dan memenuhi persyaratan asumsi normalitas.

4.2.1.2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dapat dideteksi pada model regresi apabila terdapat variasi bebas yang saling berkorelasi kuat satu sama lain yaitu dengan melihat nilai VIF dan *Tolerance* pada output hasil regresi. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas jika nilai VIF berada di sekitar angka 1 sedangkan nilai *Tolerance* mendekati angka 1 (Santoso, 2017: 366).

Berdasarkan output regresi didapat kesimpulan dari nilai tolerance dan VIF yang disajikan dalam rangkuman sebagai berikut.

Tabel 9

Rangkuman Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Hasil Uji Multikolinearitas		Kesimpulan
	VIF	Tolerance	
Pertumbuhan Ekonomi	1,072	0,814	Tidak terjadi multikolinearitas
PMDN	1,226	0,851	Tidak terjadi multikolinearitas
PMA	1,024	0,899	Tidak terjadi multikolinearitas
Upah Minimum Provinsi	1,245	0,867	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data olahan, 2016

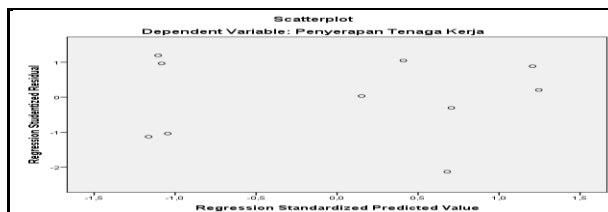
Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel bebas berada di sekitar angka 1 sedangkan nilai *Tolerance*-nya mendekati 1. Berdasarkan nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variasi variabel-variabel bebas.

4.2.1.3. Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik plot (*scatter plot*) yang diperoleh melalui output perhitungan regresi. Jika gambar tersebar tidak merata dan tidak membentuk suatu pola berarti model regresi bebas heteroskedastisitas.

Gambar 2

Grafik Scatter Plot



Sumber: Data olahan, 2016

Gambar *Scatter Plot* di atas menunjukkan bahwa gambar titik-titik tersebar merata dan tidak membentuk suatu pola tertentu misalnya pola naik atau pola turun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heterokedastisitas dan memenuhi asumsi homokedastisitas.

4.2.1.4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil regresi didapati nilai Durbin-Watson (DW) adalah 2,459 sedangkan berdasarkan tabel statistik Durbin-Watson dengan nilai probabilita 0,05, jumlah n sebanyak 10, dan jumlah k sebanyak 4, didapati nilai $dl = 0,3760$ serta nilai $du = 2,4137$. Dengan angka yang demikian maka pengujian autokorelasi mencapai kriteria $du(2,4137) < DW (2,459) < 4 - du(4 - 2,4137)$ sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi.

4.2.2. Koefisien Determinasi (R²)

Berikut ini tabel 10 yang memuat rangkuman outputperhitungan regresi yang telah dilakukan.

Tabel 10

Rangkuman Output Regresi

HASIL REGRESI	NILAI
R square	0,936
Konstanta (α)	2.999.917,543
Koefisien regresi 1 (β1)	0,732
Koefisien regresi 2 (β2)	0,717
Koefisien regresi 3 (β3)	0,723
Koefisien regresi 4 (β4)	-0,628
Standar error	129.706,101
Durbin Watson (DW)	2,459
F – Hitung	18,201

T - Hitung variabel:	- Pertumbuhan ekonomi	3,077
	- PMDN	3,325
	- PMA	2,876
	- Upah minimum provinsi	-3,129

Sumber: Data olahan, 2017

Dari tabel di atas, didapati nilai koefisien determinasi (R^2 /Rsquare) adalah sebesar 0,936. Hal ini berarti variabel bebas dipengaruhi oleh variabel terikat sebesar 93,6 persen sementara 6,4 persen lainnya ditentukan oleh variabel lain yang berada di luar model regresi.

Berdasarkan nilai koefisien regresi (nilai β_1) dapat disimpulkan bahwa kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 1 % didorong oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,732 %. Sementara berdasarkan nilai koefisien regresi (nilai β_2) menyatakan bahwa kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 1 % didorong oleh kenaikan PMDN sebesar 0,717 %. Kemudian berdasarkan nilai koefisien regresi (nilai β_3) dapat disimpulkan bahwa kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 1 % didorong oleh kenaikan PMA sebesar 0,723 %. Selanjutnya berdasarkan nilai koefisien regresi (nilai β_4) dapat disimpulkan bahwa kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 1 % didorong oleh penurunan upah minimum provinsi sebesar 0,628 %.

Berdasarkan nilai konstanta, standar error, dan koefisien regresi yang didapat pada tabel di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$PTK = 2,999,917,543 + 0,732 PE + 0,717 PMDN + 0,723 PMA - 0,628 UMP + 129,706,101$$

Nilai koefisien regresi bernilai positif untuk variabel pertumbuhan ekonomi, PMDN, dan PMA menunjukkan hubungan yang searah yang artinya kenaikan pada variabel-variabel tersebut akan menyebabkan kenaikan pada penyerapan tenaga kerja atau sebaliknya. Nilai koefisien regresi bernilai negatif untuk variabel upah minimum menunjukkan hubungan berkebalikan yaitu apabila upah minimum mengalami kenaikan maka akan cenderung

menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja atau sebaliknya.

4.2.3. Uji Statistik

4.5.3.1. Uji F (Simultan)

Nilai F hitung seperti yang telah dipaparkan di atas adalah 18,201. Dengan probabilita 0,05, nilai degree of freedom 1 ($df_1 = k - 1$) adalah 4 dan degree of freedom 2 ($df_2 = n - k$) adalah 7, maka didapat nilai F tabel yaitu sebesar 5,19. Dengan membandingkan F hitung dengan F tabel maka di dapat bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, PMDN, PMA dan Upah minimum provinsi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

4.5.3.2. Uji t (Parsial)

Nilai t hitung pada masing-masing variabel telah dipaparkan pada tabel 4.7 di atas. Untuk nilai t tabel didapat dengan probabilita 0,05 pengujian dua arah, nilai degree of freedom ($df = n - k$) adalah 5, maka didapat nilai t tabel yaitu sebesar 2,57058. Dengan membandingkan t hitung dengan t tabel maka didapat kesimpulan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Hasil Uji Statistik Parsial (Uji t)

No.	Variabel Bebas	Nilai t-hitung	Nilai t-tabel	Kesimpulan
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,077	2,57058	Signifikan
2	PMDN	3,325		Signifikan
3	PMA	2,876		Signifikan
4	Upah Minimum Provinsi	-3,129		Signifikan

Sumber: Data olahan, 2017

Dari tabel di atas terlihat nilai t hitung seluruh variabel bebas lebih besar dari t-tabel sehingga kesimpulan yang diambil adalah masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Tanda negatif yang ada pada nilai t hitung variabel upah minimum menunjukkan hubungan berkebalikan antara upah minimum provinsi dengan penyerapan tenaga kerja.

4.2. Interpretasi Hasil Regresi

Berdasarkan hasil regresi yang telah dipaparkan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan porsi penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (β_1) yang nilainya paling tinggi dari koefisien variabel lain.

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan nilai koefisien β_1 pada hasil regresi didapat bahwa kenaikan 1 persen penyerapan tenaga kerja didorong oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,732 persen. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa apabila terjadi penambahan nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian Sumatera Selatan pada suatu periode tertentu maka dapat diramalkan bahwa telah terjadi peningkatan penggunaan tenaga kerja pada periode tersebut. Beberapa kajian teoritis mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan timbal balik dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi dapat mendorong sektor usaha meningkatkan penggunaan tenaga kerja atau pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh akibat adanya peningkatan penggunaan tenaga kerja sehingga terjadinya penambahan produksi.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) juga berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan. Investasi melalui PMDN dan PMA berperan penting dalam menyokong perkembangan sektor usaha Sumatera Selatan. Suntikan dana investasi mampu menggerakkan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan teknologi atau penambahan tenaga kerja serta pembukaan lapangan kerja baru. Berdasarkan nilai koefisien β_2 dan β_3 pada hasil regresi didapat bahwa kenaikan 1 persen penyerapan tenaga kerja didorong oleh kenaikan PMDN sebesar 0,717 persen dan kenaikan PMA sebesar 0,723 persen.

Jika dana investasi lebih banyak diarahkan kepada peningkatan teknologi dalam hal ini misalnya penambahan mesin dan peralatan produksi saja, maka investasi tidak mampu mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja secara signifikan. Hal ini dikarenakan jika investasi lebih condong untuk meningkatkan modal yaitu mesin dan alat produksi saja, maka tentu tidak terjadi penambahan penggunaan tenaga kerja. Namun apabila dana investasi lebih banyak dialokasikan untuk peningkatan kapasitas produksi melalui penambahan jumlah tenaga kerja atau membuka cabang produksi baru, maka peran investasi jelas mampu mendorong pertumbuhan penggunaan tenaga kerja baru. Di Provinsi Sumatera Selatan investasi lebih banyak dialokasikan untuk proyek-proyek yang sifatnya tidak hanya padat modal akan tetapi lebih diarahkan kepada padat karya terutama di sektor usaha kecil menengah.

Upah minimum provinsi juga berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga. Hal ini sesuai dengan teori dimana tingkat upah akan selalu berkebalikan dengan jumlah penggunaan tenaga kerja. Tingkat upah minimum akan selalu menjadi pertimbangan bagi sektor usaha dalam melakukan penambahan penggunaan tenaga kerja. Berdasarkan nilai koefisien β_4 pada hasil regresi didapat bahwa kenaikan 1 persen penyerapan tenaga kerja didorong oleh penurunan upah minimum provinsi sebesar 0,628 persen

Secara teoritis, perusahaan hanya akan membayar upah tenaga kerja sesuai dengan produktivitasnya, artinya tenaga kerja yang produktivitasnya rendah akan menerima upah yang rendah dan sebaliknya. Pada kenyataannya, upah minimum yang ditetapkan lebih banyak ditentukan oleh aspek kenaikan tingkat harga dibandingkan dengan kenaikan produktivitas. Produktivitas belum menjadi determinan utama dalam penentuan upah (Bappenas (2010: 61). Kenaikan tingkat upah minimum akan selalu menjadi salah satu faktor penentu bagi perusahaan untuk menghentikan perekrutan tenaga kerja baru atau bahkan melakukan PHK terhadap tenaga kerja lama.

Pada dasarnya penerapan upah minimum berfungsi untuk mencegah terjadinya eksploitasi perusahaan terhadap tenaga kerja melalui upah rendah. Terkait hal di atas, pada prakteknya

perusahaan-perusahaan yang tidak bersedia membayar pada tingkat upah minimum yang ditetapkan dengan asumsi upah minimum tersebut lebih besar dari upah pasar, maka perusahaan tersebut akan melakukan efisiensi dengan cara mengurangi penggunaan tenaga kerja. Sementara perusahaan yang bersedia membayar pada tingkat upah minimum tersebut biasanya akan melakukan eksploitasi tenaga kerja dalam bentuk penambahan beban kerja pada pekerja. Di sisi lain, penetapan upah minimum juga dapat membuat perusahaan menaikkan harga produknya untuk menutupi peningkatan biaya upah mereka sehingga dapat memicu inflasi.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan selama periode 2006-2015 jumlahnya berfluktuasi. Lebih dari 50 persen tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Sisanya sebagian besar terserap oleh sektor perdagangan dan jasa-jasa.
2. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui regresi didapati bahwa pertumbuhan ekonomi, PMDN, dan PMA berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, PMDN, dan PMA maka cenderung akan meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Sementara untuk upah minimum provinsi memiliki pengaruh yang juga signifikan namun negatif. Artinya peningkatan upah minimum akan cenderung menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat besarnya peranan investasi bagi penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan, maka usaha penciptaan iklim bisnis yang sehat, pembangunan infrastruktur, serta kemudahan birokrasi sangat penting diwujudkan di Sumatera Selatan agar mampu menarik minat investor untuk menanam modal. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus menyusun strategi kebijakan yang tepat dan efektif terkait permasalahan ini.

2. Penulis menyadari bahwa perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan alternatif penambahan variabel lain, penambahan series tahun data, atau penggunaan alat analisis lain agar diperoleh gambaran yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, BR. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Arida, Agustina, et al. 2015. Analisis Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh. *Jurnal Agriseip* Vol (16) No. 1. Nanggroe Aceh Darussalam
- Asaddin, Fuad dan Mansoer, Faried Wijaya. 2001. *Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja: Terapan Model Kebijakan Prioritas Sektoral Untuk Kalimantan Timur*. *Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi*. Vol. 1 No. 1.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Indikator Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2016*. BPS. Palembang
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Daerah Sumatera Selatan Tahun 2016*. BPS. Palembang
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Situasi Ketenagakerjaan Sumatera Selatan Tahun 2016*. BPS. Palembang
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2016*. BPS. Palembang
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bappenas. 2010. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014*. Buku II. Jakarta: Bappenas.
- Case, dan Fair. 2005. *Prinsip-prinsip Ekonomi Mikro, Edisi IX, (Alih Bahasa Barlian Muhamad)*. PT INDEKS. Jakarta.
- Chusna, Arifatul. 2013. Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011. *Economics Development Analysis Journal* 2

- (3) ISSN 2252-6889. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Dimas dan Woyanti, Nenik. 2009. Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 16, No. 1, hal. 32-41. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Dornbusch, R., Fischer, S., Startz, R. 2001. *Makroekonomi*. Media Global Edukasi. Jakarta.
- Dumairy. 2004. *Matematika Terapan Untuk Bisnis dan Ekonomi*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ehrenberg, Ronald G & Smith Robert S. 2012. *Modern Labor Economics: Theory And Public Policy*. Prentice Hall. New York.
- Kuncoro, Haryo. 2002. "Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. *Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, Vol. 7 No. 1, 2002. ISSN:1410-2641.
- Mankiw, N.Gregory. 2007. *Makroekonomi*, Edisi Keenam. Erlangga. Jakarta.
- Mahalli, Kasyful. 2008. Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan. *WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*, Vol.3, No.3, April 2008. Medan.
- Pangastuti, Yulia. 2015. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Economics Development Analysis Journal* 4 (2) 2015. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Samuelson, Nordhaus. 2005. *Economics* 18th Edition. Mc Graw Hill-Irwin. New York.
- Santoso, Singgih. 2017. *Menguasai Statistik dengan SPSS 24*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman. J. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.
- Sitanggang, I. R. dan Nachrowi, N.D. 2004. Pengaruh Struktur Ekonomi pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model demometrik di 30 Propinsi pada 9 Sektor di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 5. No. 1. FEUI. Jakarta.
- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sukirno, Sadono, 2010. *Teori Pengantar Makroekonomi*, Edisi Ketiga. Raja Grafindo. Jakarta.
- Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Propinsi di Indonesia. *Jurnal EKSOS* Vol. 8 No. 3 Oktober 2012 hal 195 - 211 ISSN 1693 - 9093. Universitas Negeri Pontianak.
- Sobita, Nindya Eka dan Suparta,. 2014. Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Lampung *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.3, NO 2, Juli 2014. Universitas Lampung. Lampung
- Tarigan, Robinson. 2007. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Tarmizi, Nurlina. 2012. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Unsri Press. Palembang